

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA SKPD DI MERAUKE

Afilu Hidayattullah, Irine Herdjiono
Universitas Musamus Merauke
afilu_hidayattullah@yahoo.com
irene.herdjiono@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Responden dalam penelitian ini adalah para Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai kasubag, keuangan, program dan evaluasi, bendahara dan staf keuangan di 27 SKPD Kabupaten Merauke. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 116 responden. Metode pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan dasar rumus Yamane sedangkan metode pengolahan data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian persial menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengujian secara simultan menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Merauke.

Kata kunci: anggaran, akuntabilitas, kinerja, pengendalian, sistem

Abstract

The research aimed to analyze the effect of budget goal clarity, controls accounting and systems reporting for performance accountability of toward government agencies. respondents in this research is the civil servants who served as head of finance, program and evaluation, treasurer and finance staff in 27 SKPD of District Merauke. The amount of samples in this study was 116 respondents. The sample collection method using a basic formula Yamane, while the method of processing data using multiple linear regression analysis. The partial testing results showed that the goal budget clarity, accounting controls and reporting systems have significant effect on performance accountability of government agencies and simultaneous testing showed significant positive effect on performance accountability of government agencies in Merauke.

Key-Words: budget, accountability, performance, control, system

PENDAHULUAN

Akuntabilitas adalah perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (LAN, 2003). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah wujud pertanggungjawaban

pejabat pemerintah kepada publik tentang kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran. Penyusunan LAKIP dimaksud bertujuan untuk menggambarkan penerapan rencana strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengemukakan Laporan Keuangan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2013, diberi Opini WDP (wajar dengan pengecualian), dan hasil evaluasi Kementerian Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia

atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Merauke nomor b/659/M.PAN.RB/01/2014 tanggal 30 Januari 2014vmendapat nilai sangat rendah yaitu 30,34 atau dengan predikat C hal ini disebabkan karena aparat pemeriksa Inspektorat belum melakukan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada seluruh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Merauke, ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Kabupaten Merauke belum terlaksana secara maksimal (Papua Selatan Pos, 2014).

Pemerintah selaku pengelola dana publik agar dapat memenuhi akuntabilitas kiranya memperhatikan beberapa hal antarlain: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Anggaran adalah suatu rencana yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan uang yang berjangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran, dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka, akan memudahkan individu untuk menyusun target- target anggaran yang sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Pada konteks Pemerintah Daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Aparat akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat.

Indudewi (2009) menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran menunjukkan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Brebes. Sama halnya dengan penelitian Anjarwati (2012) menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tegal dan Pemalang, dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berbeda dengan Herrawaty (2011) yang meneliti pengaruh

kejelasan saran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Jambi. Menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh negatif, dan dilihat dari tingkat signifikansinya tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata dapat dilakukan dengan pengendalian manajemen yang baik. Salah satu jenis pengendalian manajemen adalah pengendalian keuangan (*financial control*) dengan memanfaatkan sistem akuntansi (Darma, 2004). Sistem pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktifitas organisasi. Penggunaan sistem pengendalian diharapkan mampu mengestimasi biaya dan *profitabilitas* keberhasilan tertentu dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Penelitian Setiawan (2013) yang menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pelalawan, sama halnya dengan penelitian Indudewi (2009) yang menyimpulkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan dimana pengendalian adalah proses yang dilakukan dalam manajemen organisasi untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Penelitian Herawaty (2011) dan Ajarwati (2012) menunjukkan hasil yang berbeda atau sebaliknya.

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang disajikan secara akurat, relevan, konsisten, dan dapat dipercaya. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP mengemukakan laporan yang baik

adalah laporan yang harus disusun secara objektif, jujur, dan transparan.

Anjarwati (2012) menyimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tegal dan Pemalang. Didukung pula dengan penelitian Indudewi (2009) menunjukkan hasil yang sama, karena dengan adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan, akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Menurut Mardiasmo (2009) dalam melaksanakan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan dua jenis pelaporan yaitu: Pelaporan Vertikal kepada Pusat dan Pelaporan Horizontal kepada DPRD dan Masyarakat luas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP) wajib disusun oleh setiap instansi pemerintah dan pejabat yang secara *fungsiional* bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing, sekaligus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas penulis akan melakukan penelitian tentang: **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD di Merauke”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (LAN, 2003).

Kejelasan sasaran anggaran

Anggaran adalah rencana kegiatan yang dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang terutang secara kuantitatif (Sasongko, 2010).

Pengendalian akuntansi

Pengendalian intern akuntansi adalah menurut tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 13 Tahun 2006).

Sistem pelaporan

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Abdullah, 2005)

Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh manatujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Suhartono dan Solichin, 2006). Anjarwati (2012) menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tegal dan Pemalang, dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik suatu hipotesis hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

H₁:

terdapat pengaruh positif kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Pengendalian intern akuntansi adalah menurut tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Peningkatan perencanaan dan pengendalian terhadap aktivitas dengan cara perbaikan sistem akuntansi sektor publik diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi, efisiensi serta efektivitas pemerintah daerah, terutama dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas aktifitas dan kinerja pemerintah daerah. Pengendalian akuntansi menekankan pada tindakan-tindakan untuk mencegah kesalahan (kekeliruan yang tidak disengaja) dan ketidakberesan (tindakan-tindakan penyimpangan yang disengaja).

Indudewi (2009) dan Setiawan (2013) menyimpulkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana pengendalian adalah proses yang dilakukan dalam manajemen organisasi untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Penggunaan pengendalian akuntansi memungkinkan para manajer dapat membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan *profitabilitas* keberhasilan tertentu dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik suatu hipotesis hubungan antara pengendalian akuntansi dan akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

H₂: terdapat pengaruh positif pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. LAN dan BPKP mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif dan transparan. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan.

Anjarwati (2012) menyimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tegal dan Pemalang, didukung pula dengan penelitian Indudewi (2009) menunjukkan hasil yang sama, karena dengan adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan, akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, dimana sistem pelaporan yang baik akan mencantumkan penjelasan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik suatu hipotesis hubungan antara sistem pelaporan dan akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

H₃: terdapat pengaruh positif system pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian atau riset ini dirancang sebagai penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala sub.bagian keuangan, program dan evaluasi bendahara dan staf bagian keuangan SKPD Kabupaten Merauke. Sampel dalam penelitian ini meliputi kepala sub bagian keuangan, program dan evaluasi, bendahara keuangan dan staf bagian keuangan pada 16 dinas dan 11 badan dengan populasi berjumlah 162 orang. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 116, yang diperoleh menggunakan rumus Yamane.

Jenis data penelitian ini adalah data primer yaitu data yang berasal dari sumber yang asli dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan penelitian. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban ataskuesioner yang dibagikan kepada responden.

1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Akuntabilitas Kinerja (Y)

Mardiasmo (2009) Pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat diukur menggunakan 4 dimensi, yaitu Akuntabilitas Hukum, Kebijakan, Proses dan Program.

Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)

Anggaran adalah rencana kegiatan yang dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang terutang secara kuantitatif (Sasongko, 2010). Kejelasan sasaran anggaran merujuk pada tingkat dimanasasaran anggaran adalah dinyatakan secara spesifik dan jelas, dan dipahami oleh pihak yang

bertanggung jawab untuk memenuhinya. Kejelasan sasaran anggaran diukur menggunakan 5 indikator yang diadopsi dari Indudewi (2009) yaitu: Spesifik, Terukur, Menantang tapi realistis, Berorientasi pada hasil akhir, Memiliki batas waktu.

Pengendalian Akuntansi (X2)

Sistem pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktifitas organisasi, dimana pengendalian adalah proses yang dilakukan dalam manajemen organisasi untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Pengendalian akuntansi diukur menggunakan 6 indikator yang diadopsi dari Anthony (2000) yaitu: Pemisahan fungsi, Prosedur pemberian wewenang, Prosedur dokumentasi, Prosedur dan catatan akuntansi, Pengawasan fisik, Pemeriksaan intern secara bebas.

Sistem Pelaporan (X3)

Sistem pelaporan adalah laporan yang menggambarkan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil untuk mengoreksi variansi yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk merepresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggung jawabkan. Sistem pelaporan diukur menggunakan 3 indikator penting yang diadopsi dari Anthony (2000) yaitu: Penyebab terjadinya penyimpangan, Tindakan yang diambil dan Lamanya waktu koreksi.

2. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data pada penelitian ini menggunakan model regresi dan pengujiannya dilakukan dengan menggunakan peranti lunak *Software Statistical Package for Social Science* atau *Statistical Product and service Solution* (SPSS)

20) Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis regresi linear berganda (*Multiple Regression Analysis*).

a. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut (Sugiyono, 2007) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul mengenai variabel-variabel dalam penelitian.

b. Uji Validitas

Menurut (Sugiyono, 2007) uji validitas digunakan untuk mengukur kelayakan butir-butir dalam suatu daftar kuisisioner baik pernyataan dan pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Korelasi antara masing-masing pernyataan dan pertanyaan terhadap skor total variabel menunjukkan hasil probabilitas diatas 0,05.

c. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2006). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,6.

d. Uji Asumsi Klasik Pengujian Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan melihat tabel Kolmogorov-smirnov. Jika hasil pada tabel Kolmogorov-smirnov menunjukkan tingkat signifikansi > 0,05 maka distribusi data tersebut normal dan jika < 0,05 maka distribusi data tersebut tidak normal (Ghozali, 2006).

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Nilai yang digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai toleransi berkisar antara 0 dan 1 > 0.01 sama dengan nilai VIF > 10, namun jika menunjukkan < 10 maka tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas (Ghozali, 2006).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat data tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot* disekitar nilai X dan Y dengan menggunakan bantuan program *statistic SPSS* yang menyediakan menu *scatter plot*, dengan memasukkan variabel ZPRED pada sumbu X dan SRESID pada sumbu Y, jika titik-titik menyebar dalam *scatter plot*, pada yang diatas dan dibawah angka 0 (nol) maka ini menunjukkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

Pengujian Hipotesis

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : akuntabilitas kinerja
- a : konstanta
- β : koefisien regresi
- X_1 : kejelasan sasaran anggaran
- X_2 : pengendalian akuntansi
- X_3 : sistem pelaporan
- e : eror

e. Pengujian Persial (Uji t)

Pengujian persial atau uji t adalah signifikan secara individual, yang menunjukkan seberapa jauh variabel bebas (*independen*) secara individual atau persial berpengaruh terhadap variabel terikat (*dependen*).

f. Pengujian Simultan (Uji f)

Pengujian signifikan simultan atau uji f merupakan pengujian signifikansi secara bersama-sama yang menunjukkan pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

g. Uji Koefisien Determinasi (R²)

MenurutGhozali (2012:97) menyatakanbahwakoefisiendeterminasi (R²) padaintinyamengukurseberapajauhkemampuan model dalammenerangkanvariabelterikat. R²dapatdiinterpretasikanbahwasebesar (R² x 100%) variasidarivariabelterikatmampudijelaskanoleh variabelbebas, sedangkansisanya (100% - R² x 100%) dipengaruhiolehfaktor lain di luar model.

A. Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Data nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi dapat dilihat pada Tabel. 1.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mini mum	Maxi mum	Mean	Std. Deviati on
X1	116	22	35	29,37	2,545
X2	116	34	50	44,38	4,277
X3	116	9	15	12,95	1,468
Y	116	49	70	61,16	5,458
Valid N (listwise)	116				

Sumber: Data diolah 2015

2. Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas yang dilakukan terhadap seluruh kuesioner dinyatakan valid karena r-hitung > r-tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lolos uji validitas data.

3. Hasil Uji Reliabilitas

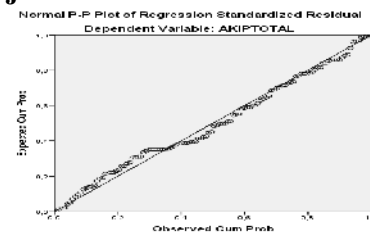
Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach 's Alpha	Batas Reliabilit as	Keterang an
X1	0,722	0,600	Reliabel
X2	0,867	0,600	Reliabel
X3	0,684	0,600	Reliabel
Y	0,902	0,600	Reliabel

Sumber: Data diolah 2015

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel diatas menunjukkan bahwa pernyataan dalam kuesioner dapat dikatakan reliabel karena mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6.

4. Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data diolah 2015
 Gambar 1. Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji 1 Sample K-S

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
Kolmogorov-Smirnov Z	,638
Asymp. Sig. (2-tailed)	,811

Sumber: Data diolah 2015

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

Berdasarkan tabel diatas hasil uji *Kolmogorof Smirnof* (K-S), besarnya nilai *Kolmogorof Smirnov* adalah 0,638 dan signifikansi $0,811 > 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

5. Hasil Uji Multikolinearitas

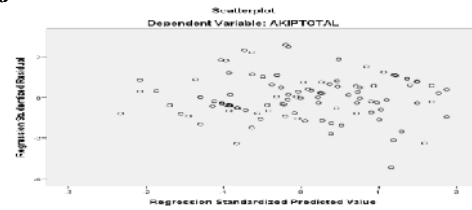
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
X1	0,776	1,289	Tidak Multikolinearitas
X2	0,689	1,452	Tidak Multikolinearitas
X3	0,631	1,585	Tidak Multikolinearitas

Sumber: Data diolah 2015

Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada nilai variabel independen yang memiliki nilai tolerance dibawah 0,01 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hasil yang sama karena tidak ada nilai Vif dari masing-masing variabel yang lebih dari 10.

6. Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah 2015

Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar, grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa data tersebar dibawah dan diatas angka (0) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, dan penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan variabel yang mempengaruhinya yaitu, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan.

7. Hasil Pengujian Hipotesis

a. Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Analisis ini mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel *independen* berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel *independen* mengalami kenaikan atau penurunan.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	Koefisien regresi
X1	0,379
X2	0,409
X3	1,458

Sumber: Data diolah 2015

Created with

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
 $Y = 12,979 + 0,379X_1 + 0,409X_2 + 0,1458X_3 + e$

b. Hasil Pengujian Persial

Tabel 6. Hasil Pengujian Persial

Variabel	Sig	t- hitung	Keterangan
X1	0,018	2,401	Diterima
X2	0,000	4,099	Diterima
X3	0,000	4,798	Diterima

Sumber: Data diolah, 2015

Hasil uji hipotesis pertama diperoleh nilai $t_{hitung} 2,401 > t_{tabel} 1,981$ dan nilai signifikansi sebesar $0,018 < 0,05$, karena t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} dan nilai signifikansi dibawah $0,05$ maka hipotesis pertama diterima, yang artinya kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kejelasan sasaran anggaran dapat membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran tingkat kinerja dapat dicapai. Pencapaian kinerja ini akan terkait dengan motivasi, dimana hal ini disebabkan dengan motivasi yang tinggi akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran anggaran yang tidak jelas akan menimbulkan ketidakpastian atau keragu-raguan para pelaksana yang mengakibatkan penurunan kinerja dan berarti bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan menurun.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya demi tercapainya akuntabilitas kinerja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herawaty (2010), Anjarwaty (2012) dan Setiawan (2013) bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil uji hipotesis ke-2 diperoleh nilai $t_{hitung} 4,099 > t_{tabel} 1,981$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, karena t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} dan nilai signifikansi dibawah $0,05$ maka hipotesis ke-2 diterima, yang artinya pengendalian akuntansi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengendalian akuntansi adalah perencanaan organisasi serta prosedur dan catatan terkait dengan pengamanan harta kekayaan organisasi dan reliabilitas laporan keuangan. Pengendalian akuntansi diperlukan dalam proses penetapan standar dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja yang dilakukan berbeda dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan adanya pengendalian diharapkan aparat pemerintah menggunakan sumber daya secara efektif, efisien dan ekonomis, karena pelayanan yang ekonomis, efisien dan efektif kepada masyarakat merupakan indikator kinerja instansi pemerintah daerah. Tercapainya indikator tersebut merupakan

suatu prestasi yang dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang bersangkutan Indudewi (2009).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indudewi (2009) dan Setiawan (2013) bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah karena pengendalian akuntansi berperan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil uji hipotesis ke-3 diperoleh nilai hitung 4,798 > tabel 1,981 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka hipotesis ke-3 diterima, yang artinya sistem pelaporan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Adanya sistem pengelolaan keuangan daerah termasuk sistem akuntansi keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan akan menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. LAN dan BPKP (2000) mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif dan transparan. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Herrawaty (2011) dan Anjarwaty

(2012) bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, karena dengan adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan, akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, dimana sistem pelaporan yang baik akan mencantumkan penjelasan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif.

c. Hasil Pengujian Simultan

Tabel 7. Hasil Pengujian Simultan

Probabilitas	Keterangan
0,000	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ maka keputusannya H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, artinya bahwa variabel-variabel independen layak digunakan untuk memprediksi variabel dependennya.

d. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjust R Square
0,727	0,528	0,515

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan tabel diatas besarnya adjusted R^2 adalah 0,515 atau 51,5%, yang artinya bahwa variabel independen, yaitu kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan mampu menjelaskan variabel dependen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 51,5% sedangkan sisanya

48,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

B. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengujian persial variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1) berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya demi tercapainya akuntabilitas kinerja.
2. Pengujian persial variabel pengendalian akuntansi (X_2) berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan adanya pengendalian akuntansi diharapkan proses yang dilakukan dalam manajemen organisasi menjamin bahwa sumber daya digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja yang dilakukan berbeda dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya demi meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
3. Pengujian persial variabel sistem pelaporan (X_3) berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan, akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, dimana sistem pelaporan yang baik akan mencantumkan penjelasan mengenai

penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif demi meningkatkan akuntabilitas kinerja.

4. Pengujian secara simultan variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

C. Saran

1. Bagi Instansi Pemerintah

Bagi instansi pemerintah kabupaten Merauke hendaknya memperhatikan kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan demi tercapainya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah sampel, agar hasil penelitian bisa lebih menggambarkan keadaan sebenarnya dan menambah variabel lain seperti: motivasi, disiplin kerja, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah daerah, dan penerapan akuntabilitas keuangan.

Refrensi

- Abdullah, Hilmi. 2005. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta). *Kompak*, No 13:37-67
- Anjarwati, Mei. 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

- Pemerintah. *Accounting Analysis Journal* Vol 1 No.2.
- Anthony, R.N., Dearden, dan Bedford. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi V. Erlangga, Jakarta.
- Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kabupaten Merauke.
- Darma, E. S, 2004, *Pengaruh Kejelasan Sasaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi VII, IAI,2004.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herawaty, Netty. 2011. “*Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi*”. Simposium Nasional Akuntansi Vol.13.Jambi.
- Indudewi, Dian. 2009. *Pengaruh Sasaran Jelas dan Terukur, Insentif, Desentralisasi dan Pengukuran Kinerja terhadap Kinerja Organisasi*, Tesis S-2 Universitas Diponegoro Semarang: Diunduh dari: Perustakaan elektronik UNDIP:<http://www.e-prints.undip.ac.id>
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- [Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi kelima. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Sasongko, Catur; Safrida Rumondang, 2010. *Anggaran*. Salemba Empat: Jakarta.
- Setiawan, Eko. 2013. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan*. Skripsi. Jurusan Akuntansi.Universitas Riau.
- Suhartono, Ehrmann; Solichin, Mochammad, 2006. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi*.SNA 9 Padang.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Papua Selatan Pos. 27 November 2014. Aparat Pemeriksa Inspektorat Ikut Bimtek Evaluasi LAKIP.